

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN,
KOMPETENSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DIMEDIASI OLEH
KOMITMEN ORGANISASI
(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kampar)**

Khairunsyah¹⁾
Yulia Efni²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau

Abstract: *The Purpose of this study was to examine the influence clarity budgetary targets, reporting systems, competency to performance accountability of government institution through organizational commitment as an intervening variable, specifically institution of Kampar district. Respondents in this study are the civil servants who served as head of finance, program and evaluation, staff in 20 OPD of Kampar district. The amount of samples in this research was 80 respondents. The sample collection method using proportional stratified sampling, while the method of processing data using Partial Least Square. Result of this study indicates that clarity budgetary targets, competency, organizational commitment have significant effects on performance accountability of government institution, in otherhand, reporting systems doesn't have significant effect. Clarity budgetary targets and competency to the performance accountability of the government institution through organizational commitment as an intervening variable have significant effects.*

Keywords : *clarity budgetary targets, reporting systems, competency, organizational commitment*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas serta supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks organisasi pemerintah, menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi tersebut, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Informasi disajikan secara terbuka, agar publik dapat menilai kinerja pemerintah selama tahun anggaran baik itu berupa laporan keterangan pertanggung-jawaban pemerintah atas penggunaan dana APBN/APBD dalam melaksanakan pembangunan negara/daerah serta pertanggungjawabannya dalam melaksanakan program-program yang

berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP yang menggambarkan kinerja yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. LAKIP merupakan laporan yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan perhitungan dan analisis kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan tingkat realisasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi di tahun 2015 yaitu nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat dari 64,70 (B) pada tahun 2014 menjadi 65,82 (B) pada tahun 2015. Sedangkan nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59,21 (CC) pada tahun 2014 menjadi 60,47 (B) pada tahun 2015. Untuk hasil evaluasi LAKIP pada Provinsi Riau sendiri pada tahun 2015 nilainya

sebesar 54,73 (CC) (MENPAN & Reformasi Birokrasi, 2015).

nilai evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat bahwa Kabupaten Kampar beserta 4 (empat) kabupaten lain yaitu Indragiri Hulu, Bengkalis, Dumai, dan Rokan Hulu meraih predikat CC pada tahun 2015. Walaupun Kabupaten Kampar memperoleh nilai LAKIP CC, yang lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, namun karena pemerintah mengharapkan nilai sangat baik (AA), maka kedepannya Pemerintah Kabupaten Kampar dituntut harus lebih baik lagi kinerjanya, sehingga akuntabilitas kinerjanya memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan pencapaian saat ini.

Pencapaian target misi kabupaten Kampar 2014 dibandingkan dengan rencana kerja berupa jumlah indikator sasaran dari lima misi, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar hanya sebesar 66,67%. Hasil evaluasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa program-program sasaran kinerja banyak yang tidak tercapai yang menunjukkan realisasi target kinerja lebih rendah dari target yang ditetapkan. Pencapaian target 5 (lima) misi dengan indikator sasaran sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh), tingkat pencapaiannya indikator sasaran hanya sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan). Hal ini salah satunya yang turut mempengaruhi pencapaian nilai Laporan Kinerja Kabupaten Kampar yang pada tahun 2015 mencapai nilai CC dibandingkan aspek-aspek lain dalam evaluasi atas LAKIP.

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji (1) mengetahui seberapa besar pengaruh

kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (3) mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (4) mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (5) mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi, (6) mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi, (7) mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi

KERANGKA TEORI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga

berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2006)

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja (LAKIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berkualitas harus memenuhi prinsip-prinsip laporan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Relevance (relevan)
2. *Accuracy/reliability* (akurat dan handal)
3. Konsisten dan dapat dibandingkan
4. *Verifiability/traceability* (verifikasi/ditelusuri)
5. Timeliness (Tepat Waktu)
6. Understandability (dapat dimengerti)
7. Prinsip lingkup pertanggungjawaban.
8. Prinsip prioritas.
9. Prinsip manfaat
10. Mengikuti standar laporan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kennis (1979) mempostulatkan bahwa tiga dimensi karakteristik sistem penganggaran, yaitu partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya.

Menurut Kennis (1979), adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran, akan berimplikasi pada pegawai untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin instansi pemerintah. Pegawai akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi di masa depan secara tepat.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Anthony dan Bedford, 2004).

Menurut Bastian (2010), pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodic dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut (Wibowo, 2007).

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Komitmen Organisasi

Menurut Luthans (2006) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Komitmen organisasi menurut Modway *et al.* (1982) bahwa komitmen organisasi merupakan itikad yang kuat seseorang untuk terlibat dalam suatu organisasi, yang terdiri dari (1) Keyakinan yang sungguh-sungguh akan tujuan dan nilai-nilai organisasi, (2) Kemampuan untuk berusaha atau berbuat sesuai demi kepentingan organisasi (3) Keinginan yang kuat untuk terus menjadi anggota organisasi.

Penelitian Terdahulu

Kusumaningrum (2010), Anjarwati (2012), Hidayatullah dan Herdjono (2015), Yulianti (2014), Cefrida (2014), menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan Herawaty (2011) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Kusumaningrum (2010), Anjarwati (2012), Suriani (2015), Herawaty (2011), Hidayatullah dan Herdjono (2015), Afrina (2015), Riani (2015), Yulianti (2014), menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan Aji (2014) menyatakan bahwa sistem pelaporan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Wardhana (2015), Zirman, et all (2010), Rofika dan Ardianto (2014), Putri (2015), Nofianti dan Suseno (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan Rofika dan Ardianto (2014) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Wardhana (2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sementara komitmen organisasi memperkuat pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kerangka Pemikiran

Kejelasan sasaran akan meningkatkan perwujudan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Adanya sistem pelaporan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada *stakeholder* bagaimana pertanggungjawaban kinerja tahunan pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ada.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah diperlukan agar pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat, karena dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, maka diharapkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dapat lebih baik lagi.

Komitmen organisasi dari aparatur pemerintah daerah akan meningkatkan pemahaman aparatur tentang visi, misi, tujuan dan program organisasi dalam hal ini Organisasi perangkat Daerah, kemauan kuat aparatur untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk menjalankannya sehingga diharapkan pertanggungjawaban kinerja dari instansi pemerintah bisa lebih baik lagi.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah aparatur pemerintah pada Organisasi perangkat Daerah yang terlibat serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat, serta merupakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Adanya laporan yang menjadi gambaran pertanggungjawaban bawahan kepada atasan oleh aparatur organisasi perangkat daerah yang berkomitmen untuk terlibat dalam

organisasi serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan organisasi maka akan memudahkan dalam menggambarkan tingkat pencapaian kinerja/pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Kompetensi aparatur pemerintah yang disertai dengan keinginan kuat aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan organisasinya akan mewujudkan pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis

1. Ada pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Ada pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Ada pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Ada pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Ada pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Komitmen Organisasi.
6. Ada pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Komitmen Organisasi.
7. Ada pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Komitmen Organisasi.

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengelola LAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar, sedangkan sampel

adalah sebagian dari populasi yang mewakili yaitu pengelola LAKIP pada 10 Organisasi Perangkat Daerah yang berjumlah 40 responden. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh sampel yaitu pengelola LAKIP pada sebagian Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar.

Definisi Operasional variabel dan Pengukurannya

LAKIP yang berkualitas harus memenuhi prinsip-prinsip laporan yang baik yaitu sebagai berikut (1) Relevance (relevan), (2) Accuracy/reliability (akurat dan handal), (3) Konsisten dan dapat dibandingkan, (4) Verifiability/traceability (verifikasi/ditelusuri), (5) Timeliness (Tepat Waktu), (6) Understandability (dapat dimengerti), (7) Prinsip lingkup pertanggungjawaban, (8) Prinsip prioritas, (9) Prinsip manfaat, (10) Mengikuti standar laporan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Kennis (1979) mempostulatkan bahwa tiga dimensi karakteristik sistem penganggaran, yaitu partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya

Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang

dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Anthony dan Bedford, 2004)

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Komitmen organisasi menurut Modway *et al.* (1982) bahwa komitmen organisasi merupakan itikad yang kuat seseorang untuk terlibat dalam suatu organisasi, yang terdiri dari (1) Keyakinan yang sungguh-sungguh akan tujuan dan nilai-nilai organisasi, (2) Kemampuan untuk berusaha atau berbuat sesuai demi kepentingan organisasi (3) Keinginan yang kuat untuk terus menjadi anggota organisasi.

Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen berbentuk pertanyaan tertutup. Pengukuran menggunakan skala Likert dari 1 s.d. 5. responden diminta memberikan pendapat setiap butir pertanyaan, mulai dari tidak pernah sampai selalu. Alasan penggunaan skala Likert 1 s.d. 5 adalah untuk memudahkan responden dalam memilih jawaban.

Tabel 1
Skor Alternatif Jawaban

Alternatif Jawaban	Skor Pernyataan	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Netral	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kuisisioner sebagai data primer. Uji kuisisioner dilakukan pada 80 responden. Setelah uji kuisisioner, dilakukan uji kesesuaian model, kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis Partial Least Square (PLS), seperti dinyatakan oleh Wold (1985) dalam Ghazali (2008), *Partial least square* merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis untuk menjawab tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuisisioner untuk pengumpulan data yang dikirimkan kepada Pengelola LAKIP di Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kampar. Pengiriman daftar pertanyaan diantar langsung untuk menjaga kepastian sampainya daftar pertanyaan ke tangan responden. Dari 80 kuisisioner yang dikirimkan, kuisisioner yang kembali sebanyak 80 (100%). Kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 80 (100%).

Analisis data dilakukan terhadap 31 (tiga puluh satu) pernyataan yang telah ditanggapi oleh responden yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan data.

Tabel 2
Deskripsi Variabel

Uraian	Rerata	Kategori
Kejelasan Sasaran Anggaran	4,478	Sangat Tinggi
Sistem Pelaporan	4,304	Sangat Tinggi
Kompetensi	4,314	Sangat Tinggi
Komitmen Organisasi	4,453	Sangat Tinggi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4,320	Sangat Tinggi

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2017

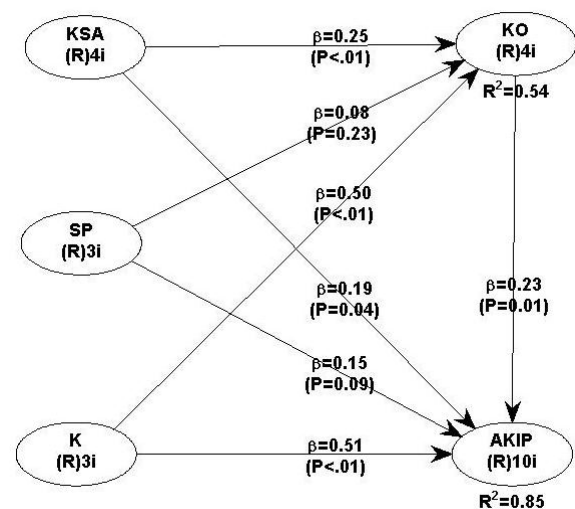
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata tanggapan responden untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran adalah 4,478 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden dalam kategori sangat tinggi. Rata-rata tanggapan responden untuk variabel Sistem Pelaporan adalah 4,304 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden berkategori sangat tinggi. Rata-rata tanggapan responden untuk variabel Kompetensi adalah 4,314 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden berkategori sangat tinggi. Rata-rata tanggapan responden untuk variabel Komitmen Organisasi adalah 4,453 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden berkategori sangat tinggi. Rata-rata tanggapan responden untuk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 4,320 sehingga dapat dijelaskan bahwa indeks persepsi responden berkategori sangat tinggi.

Metode *Partial Least Square* yang digunakan dalam penelitian ini mensyaratkan adanya dua pengujian

validitas, yaitu pengujian validitas konvergen dan pengujian validitas diskriminan. Berdasarkan hasil pengujian kuesioner, maka diketahui bahwa keseluruhan variabel yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, kompetensi, komitmen organisasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan validitas diskriminan dengan nilai loading factor > 0,5 dan nilai AVE seluruh variabel > 0,5.

Pengujian kuesioner juga dilakukan untuk mengetahui reliabilitas dari seluruh variabel. Berdasarkan hasil pengujian kuesioner tersebut, maka diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability untuk keseluruhan variabel, reliabilitasnya telah terpenuhi.

Kemudian dilakukan pengujian kesesuaian model dengan menggunakan parameter APC, ARS, AARS, AVIF, AFVIF, GoF, SPR, RSCR, SSR dan NLBCDR, dari keseluruhan parameter tersebut, berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan warppls 5.0, maka kesesuaian model telah sesuai. Berikut ini adalah hasil pengolahan data dengan menggunakan warppls 5.0:



Gambar 1
Model Penelitian

Berdasarkan pengujian pada *direct effect*, maka diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai p-value sebesar $0,04 < 0,05$, hal ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem pelaporan memiliki nilai p-value sebesar $0,09 > 0,05$, hal ini berarti bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi memiliki nilai p-value sebesar $0,01 < 0,05$, hal ini berarti bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komitmen organisasi memiliki nilai p-value sebesar $0,01 < 0,05$, hal ini berarti bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengujian pada *indirect effect*, dimana persyaratan efek mediasi yang harus dipenuhi adalah :

1. Jika koefisien jalur c'' dari hasil estimasi model (2) tetap signifikan dan tidak berubah ($c''=c$) maka hipotesis mediasi tidak didukung.
2. Jika koefisien jalur c'' nilainya turun ($c''<c$) tetapi tetap signifikan maka bentuk mediasi adalah mediasi sebagian (*partial mediation*).
3. Jika koefisien jalur c'' nilainya turun ($c''<c$) dan menjadi tidak signifikan maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (*full mediation*).

Hasil pengujian pada *indirect effect* dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Correlation among Latent Variables

No	Jalur	Direct Effect		Indirect Effect	
		Koefisien	P-value	Koefisien	P-value
1	KSA → AKIP →	0,187	0,040	0,043	0,323
2	SP → AKIP	0,147	0,086	0,011	0,405
3	K → AKIP	0,507	0,001	0,100	0,067
4	KO → AKIP	0,231	0,015		

Sumber : Data diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas dan dengan mempertimbangkan persyaratan efek mediasi yang harus dipenuhi, maka:

1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki koefisien direct effect sebesar 0,187 dan p-value sebesar $0,04 < 0,05$ yang berarti signifikan. Hasil indirect effect sebesar 0,107 dan p-value sebesar $0,161 > 0,05$ yang berarti signifikan, karena sesuai persyaratan efek mediasi poin 3, sistem kejelasan sasaran anggaran memiliki bentuk mediasi yaitu komitmen organisasi sebagai mediasi penuh.
2. Sistem pelaporan memiliki direct effect sebesar 0,147 dan p-value $0,09 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan. Berdasarkan kaidah Baron dan Kennes (1986), pengujian efek mediasi dapat dilakukan jika efek utama (pengujian langsung) variabel independen terhadap dependen adalah signifikan. Jika tidak terjadi signifikan maka pengujian efek mediasi tidak dapat dilakukan.
3. Kompetensi memiliki direct effect sebesar 0,507 dan p-value $0,01 < 0,05$ yang berarti

signifikan. Hasil indirect effect sebesar 0,100 dengan p-value $0,067 > 0,05$, yang berarti signifikan, karena sesuai persyaratan efek mediasi poin 3, sistem kejelasan sasaran anggaran memiliki bentuk mediasi yaitu komitmen organisasi sebagai mediasi penuh.

Uji Hipotesis

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa p-value $0,04 < 0,05$ artinya signifikan. Signifikan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa p-value $0,086 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Tidak signifikan berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak. Artinya sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa p-value $0,0001 < 0,05$ artinya signifikan. signifikan berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa p-value $0,015 < 0,05$ artinya signifikan. signifikan berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima. Artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi

Hasil pengolahan data secara *direct effect* menunjukkan bahwa koefisien sebesar 0,187 dan p-value $0,04 > 0,05$ dan secara indirect effect koefisien 0,043 dan p-value 0,323 artinya signifikan. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan persyaratan efek mediasi maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (*full mediation*). Komitmen Organisasi yang merupakan variabel mediasi, memediasi secara penuh, tidak ada faktor pemediasi yang lain yang mempengaruhi hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_5 diterima. Artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui komitmen organisasi.

6. Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi

Hasil pengolahan data secara *direct effect* menunjukkan bahwa p-value $0,086 > 0,05$ berarti tidak signifikan. Berdasarkan kaidah Baron dan Kennes (1986), pengujian efek mediasi dapat dilakukan jika efek utama (pengujian langsung) variabel

independen terhadap dependen adalah signifikan. Jika tidak terjadi signifikan maka pengujian efek mediasi tidak dapat dilakukan. Tidak signifikan disini berarti H_0 diterima dan H_6 ditolak. Artinya sistem pelaporan tidak ada pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui komitmen organisasi

7. Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi

Hasil pengolahan data secara *direct effect* menunjukkan bahwa koefisien sebesar 0,507 dengan p-value $0,0001 < 0,05$ dan secara *indirect effect* koefisien 0,100 dengan p-value 0,067 artinya signifikan. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan persyaratan efek mediasi maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (*full mediation*). Komitmen Organisasi yang merupakan variabel mediasi, memediasi secara penuh, tidak ada faktor pemediasi yang lain yang mempengaruhi hubungan antara Kompetensi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_7 diterima. Artinya kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui komitmen organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Indikator yang memiliki rata-rata tertinggi adalah jelas, sedangkan indikator dengan rata-rata terendah adalah realistis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran ada pengaruh secara langsung

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Variabel Sistem Pelaporan memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Indikator yang memiliki rata-rata tertinggi adalah tindakan yang diambil sedangkan indikator dengan rata-rata terendah adalah penyebab penyimpangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan tidak ada pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Variabel Kompetensi memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Indikator yang memiliki rata-rata tertinggi adalah sikap dan perilaku sedangkan indikator dengan rata-rata terendah adalah keterampilan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompetensi ada pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Variabel Komitmen Organisasi memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Indikator yang memiliki rata-rata tertinggi adalah bekerja sepenuh hati sedangkan indikator dengan rata-rata terendah adalah memahami tujuan organisasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi ada pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran ada pengaruh secara tidak langsung (*indirect*) terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah melalui komitmen organisasi sebagai faktor mediasi. Komitmen organisasi sebagai variabel yang memediasi dengan bentuk mediasi penuh, yang artinya tidak ada faktor pemediasi lain yang mempengaruhi hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selain Komitmen Organisasi.

6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan tidak ada pengaruh secara tidak langsung (*indirect*) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi sebagai faktor mediasi.
7. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompetensi ada pengaruh secara tidak langsung (*indirect*) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui komitmen organisasi sebagai faktor mediasi. Komitmen organisasi sebagai variabel yang memediasi dengan bentuk mediasi penuh, yang artinya tidak ada faktor pemediasi lain yang mempengaruhi hubungan antara Kompetensi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selain Komitmen Organisasi.

Saran

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Pada tanggapan responden diketahui bahwa indikator realistis memiliki rata-

rata yang terendah. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran lebih realistis baik itu program maupun anggarannya, sehingga aparatur pemerintah daerah dapat melaksanakan program tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Variabel Sistem Pelaporan tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, walaupun memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan faktor selain sistem pelaporan.
3. Variabel Kompetensi memiliki pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Pada tanggapan responden diketahui bahwa indikator keterampilan memiliki rata-rata terendah. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil Negara terutama pada keterampilannya yaitu penggunaan aplikasi yang *uptodate* serta semakin sering dilaksanakan pelatihan/bimbingan teknis penyusunan LAKIP sehingga

- akan semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan bukan saja terkait penyusunan LAKIP, penyusunan RKA, dan pelatihan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Variabel Komitmen organisasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan memiliki indeks persepsi responden yang sangat tinggi. Pada tanggapan responden diketahui bahwa indikator memahami tujuan organisasi memiliki rata-rata terendah. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pemahaman aparatur sipil Negara terutama pada pengelola LAKIP agar lebih paham pada visi, misi, dan tujuan di dinas tempat pengelola LAKIP tersebut bekerja, sehingga penyusunan anggaran akan berlandaskan kepada pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, hal ini akan semakin meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 5. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh secara langsung (indirect) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimediasi oleh komitmen organisasi. Salah satu indikator yang memiliki rata-rata terendah adalah realistis, dan dengan adanya faktor komitmen organisasi yaitu keinginan kuat dari aparatur pemerintah daerah untuk memajukan organisasinya, maka pemerintah Kabupaten Kampar perlu untuk mendukung aparatur pemerintah daerah dengan mengajak peran serta aparaturnya dalam rangka penyusunan RKA sehingga RKA yang telah disusun merupakan RKA yang realistis, selain daripada jelas, spesifik dan mudah dipahami. Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan nilai hasil evaluasi pada LAKIP
 6. Variabel Sistem Pelaporan tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung (indirect) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimediasi oleh komitmen organisasi. Terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lanjutan terkait faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 7. Variabel Kompetensi memiliki pengaruh secara tidak langsung (indirect) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimediasi oleh komitmen organisasi. Salah satu indikator kompetensi yang memiliki indeks persepsi rata-rata terendah adalah keterampilan, hal ini perlu ditingkatkan dengan didukung oleh komitmen organisasi dari aparatur sipil Negara yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kompetensinya untuk lebih giat meningkatkan

kemampuan dalam penggunaan aplikasi yang *uptodate* dalam mendukung pengelolaan LAKIP serta mau mengikuti pelatihan/bimbingan teknis penyusunan LAKIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afilu Hidayatullah dan Irine Herdjiono (2015) tentang *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Merauke*. Makalah disajikan pada Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U)
- Anthony, R.N. Dearden dan Bedford. 2004. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi X. Erlangga. Jakarta
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga
- Dina Afrina (2015) tentang *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi persepsian pada organisasi perangkat daerah kota Pekanbaru)*. Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
- Luthans, Fred, 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi sepuluh. Yogyakarta. Andi Publisher
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Mei Anjarwati (2012) tentang *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Accounting Analysis Journal I (2) 2012
- Mentari Cefrida S. (2014) tentang *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor public dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Pekanbaru*. Jom Fekon Vol. 1 No. 2. Oktober 2014
- Netty Herawaty (2011) tentang *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi*. Tesis
- Reni Yulianti (2014) tentang *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jom Fekon Vol. 1 No. 2. Oktober 2014
- Rofika dan Ardianto (2014) tentang *pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 2, April 2014 : 197-209. ISSN 2337-4314
- Seri Suriani (2015) tentang *The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation*

Towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo). Information Management and Business Review (ISSN 2220-3796). Vol. 7 No. 4, pp 6-22. Agustus 2015

Zirman, Edfan Darlis dan R. Muhammad Rozi (2010) tentang *pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.* Jurnal Ekonomi Vol. 18, Nomor 1. Maret 2010